

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692064/2026**

**Revisi ke 02**

**Tanggal : 09 Februari 2026**

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

**B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |   |                   |   |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (135)             | KEMENTERIAN HUKUM   |
| 2. Unit Organisasi            | : | (04)              | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM                           |
| 3. Provinsi                   | : | (26)              | BENGKULU  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : | (692064)          | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU                             |
| Sebesar                       | : | Rp. 1.021.315.000 | ( SATU MILIAR DUA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.021.315.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	1.021.315.000

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        | Rp. |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan             | Rp. | 1.021.315.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN B E N G K U L U | (016) Rp. | 1.021.315.000 |
|-------------------------|-----------|---------------|

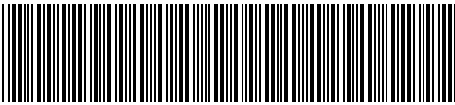
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026  
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (26) BENGKULU  
Kode>Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

							Halaman : I A. 1
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				1.021.315.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				1.021.315.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan	645.995.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	645.995.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	1.590.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara	1.590.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5,00	Lembaga	308.350.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	5,00	Lembaga	308.350.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	65.380.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1,00	Laporan	65.380.000

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026  
I B. SUMBER DANA



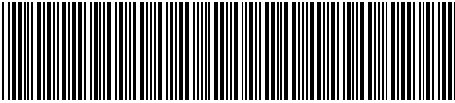
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (26) BENGKULU  
Kode>Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.021.315.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN



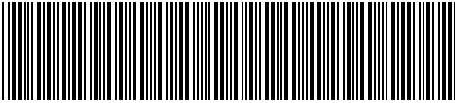
DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (26) BENGKULU  
Kode>Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692064	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU	-	1.021.315	-	-	-	1.021.315	26 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.021.315	-	-	-	1.021.315		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.021.315	-	-	-	1.021.315		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	645.995	-	-	-	645.995		
04	PNBP	-	645.995	-	-	-	645.995		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	1.590	-	-	-	1.590		
04	PNBP	-	1.590	-	-	-	1.590		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	308.350	-	-	-	308.350		
04	PNBP	-	308.350	-	-	-	308.350		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)	-	65.380	-	-	-	65.380	26 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (26) BENGKULU  
Kode/Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU  
Kewenangan : (KD)

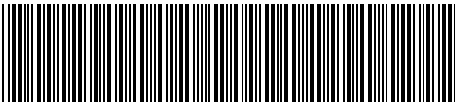
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	65.380	-	-	-	65.380	016@	
JUMLAH		-	1.021.315	-	-	-	1.021.315		

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (26) BENGKULU  
Kode>Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

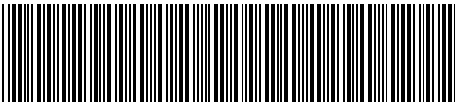
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692064	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	111.652	49.390	53.645	55.288	49.680	60.114	55.536	50.050	64.004	53.523	418.434	1.021.315
		BELANJA BARANG	0	111.652	49.390	53.645	55.288	49.680	60.114	55.536	50.050	64.004	53.523	418.434	1.021.315
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	111.652	49.390	53.645	55.288	49.680	60.114	55.536	50.050	64.004	53.523	418.434	1.021.315
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	111.652	49.390	53.645	55.288	49.680	60.114	55.536	50.050	64.004	53.523	418.434	1.021.315

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026  
IV A. B L O K I R



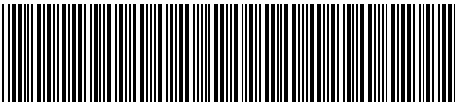
DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [26] BENGKULU  
Kode dan Nama Satker : [692064] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692064	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 402.937	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 402.937	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.296
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.093		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.410
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.400	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 420
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.800	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 263
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.750	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026	521211	Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 900
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.500	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 118.800
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.265	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026  
IV A. B L O K I R



DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [26] BENGKULU  
Kode dan Nama Satker : [692064] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

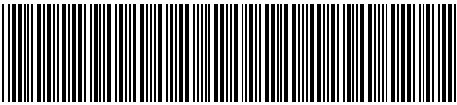
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.558 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.575 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	<b>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>		
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.827 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026  
IV B. C A T A T A N



DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [26] BENGKULU  
Kode dan Nama Satker : [692064] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO